



LKJiP

Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023

dpmptsp.pasuruankota.go.id



Jalan Pahlawan Nomer 26b, Kota Pasuruan



(0343) 422754 / 0858 0609 9777



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dapat tersusun dengan baik.

Dengan berakhirnya tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pasuruan menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

LKjIP tahun 2023 telah berpedoman pada Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian laporan ini di susun dan menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh Karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan di kemudian hari. Akhirnya semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Pasuruan, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan



INDRA GUNAWAN ST, MT

Pembina

19771206 200312 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Investasi dengan indikator : Jumlah Nilai Investasi (dalam miliar rupiah). Capaian kinerja tahun 2023 adalah Rp 276.043.368.500 atau sebesar 104.44% dari target.
- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Indeks). Capaian kinerja tahun 2023 adalah 90.91 Indeks atau sebesar 105.21% dari target.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Pasuruan yang masih dalam tahap Rehab Lantai 2 dan melengkapi sarana dan prasarana pada lantai 1.
2. Penyusunan perencanaan Pengembangan dan peningkatan investasi melalui Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Belum maksimalnya promosi investasi dikarenakan adanya keterbatasan kerjasama dengan *stakeholder* terkait;

4. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
5. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara *online* (*Online Single Submission*) terkendala oleh belum maksimalnya komitmen petugas di Dinas Teknis dalam melakukan verifikasi.
6. Belum adanya integrasi sistem dan data antar Organisasi Perangkat Daerah Kota Pasuruan yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik.
7. Pengembangan Laporan Ijin Terbit dan laporan rekomendasi OPD Teknis.
8. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan pada proses perizinan:

1. Perlu koordinasi dengan Kominfo terkait sistem perizinan.
2. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi tersebut telah memiliki sistem).

Permasalahan pelaporan:

1. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM. Selain hal tersebut kewenangan pelaporan ada di perusahaan pusat sehingga perusahaan cabang tidak mempunyai hak akses untuk pelaporan.
2. Perbedaan *database* izin yang digunakan sehingga memerlukan adanya evaluasi terkait laporan izin terbit agar sesuai dengan permintaan.
3. Terlalu banyak pelaporan setiap periode tertentu, Laporan secara periodik dari beberapa instansi sudah cukup merepotkan, perlu adanya penyederhanaan pelaporan dan pengiriman laporan secara terpadu.

Permasalahan Informasi Investasi:

1. Belum adanya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah terkait perizinan berusaha dan perizinan non usaha.
2. Masih kurangnya promosi investasi di Kota Pasuruan karena keterbatasan kerjasama dengan stakeholder terkait.
3. Minimnya informasi investasi sehingga masyarakat sulit mengembangkan

usahanya.

4. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro.
5. Perizinan mendirikan bangunan masih dirasa sangat sulit bagi masyarakat.

Permasalahan Penanaman Modal:

Keterbatasan lahan di Kota Pasuruan, serta belum ditetapkannya Perwali tentang Pemberian fasilitasi insentif untuk penanaman modal menyebabkan para Investor ragu untuk berinvestor di Kota Pasuruan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	3
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.2.2 Anggaran	7
1.2.3 Isu Strategis	8
1.3 Dasar Hukum	8
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023	17
2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2023	21
BAB III	31
3.1 Capaian Kinerja	31
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	31
3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan	31

3.1.3	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	36
3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	39
3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	40
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	48
3.2	Realisasi Anggaran	51
BAB IV	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Reviu.....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Reviu.....	13
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kota Pasuruan Tahun 2023.....	18
Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	18
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja.....	22
Tabel 2.7	Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	23
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	29
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	32
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standart Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota.....	34
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	38
Tabel 3.7	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	6
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Pasuruan No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good government*. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden no 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala, mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah yang telah dicabut dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kota Pasuruan berisi pelaporan capaian pelayanan dan output yang dihasilkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategis atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pemerintahan dan pembangunan serta perencanaan strategis (perencanaan jangka menengah, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja). Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2022 tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di luar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Koordinator JF dan Kelompok JF Informasi, Pengembangan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan dan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF Informasi, Pengembangan dan Pengaduan mempunyai fungsi:

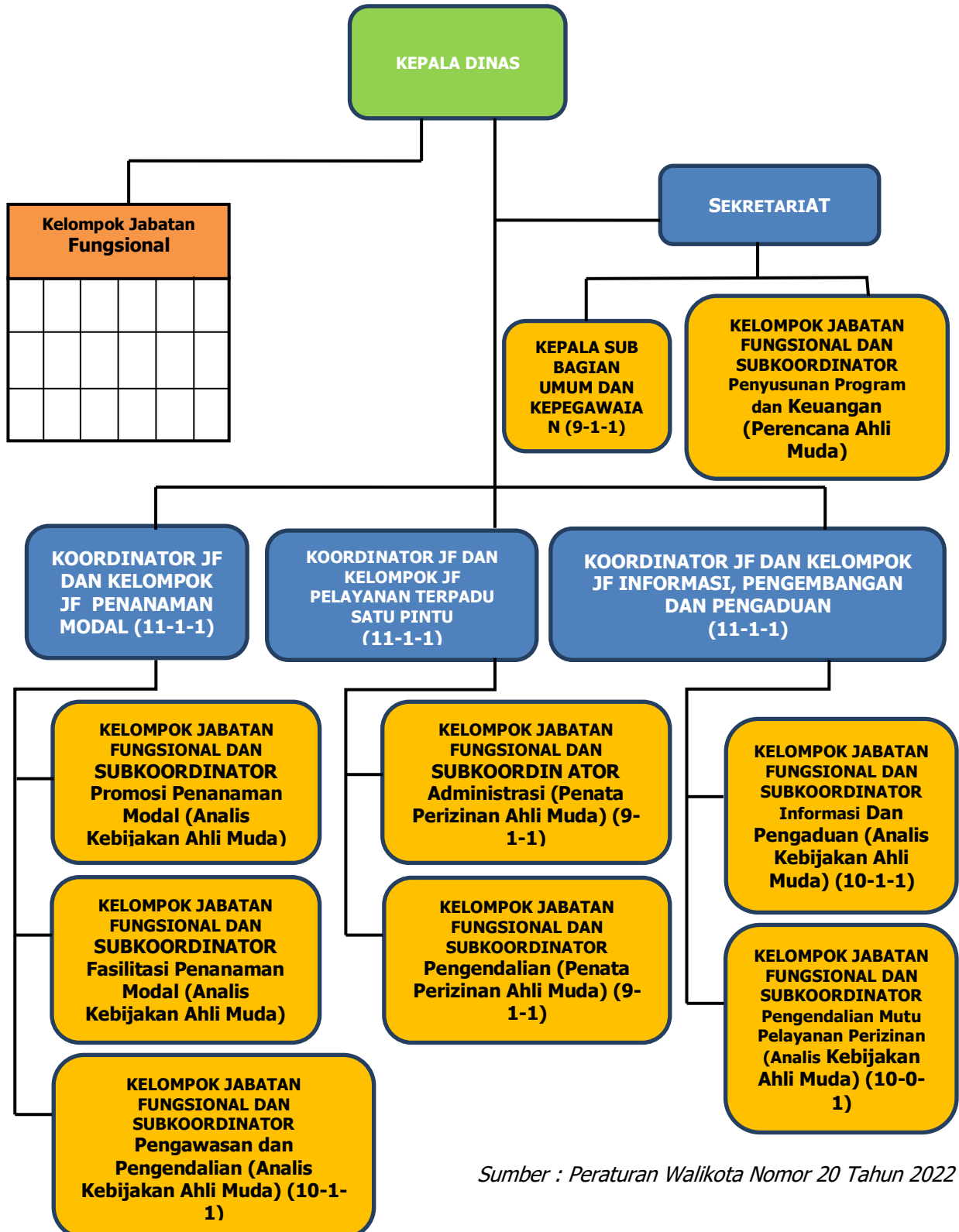
- a. Penyusunan perencanaan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan terpadu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan perizinan terpadu; dan
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan.

Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penanaman modal; dan
- f. Penyediaan informasi penanaman modal.

Struktur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan pada tahun 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 365.200.000,00. Pada awal tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.263.247.169,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 5.976.237.569,00 dan belanja modal sebesar Rp 1.287.009.600,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang didukung oleh 4 program dan 6 kegiatan. Lalu terjadi pergeseran Anggaran yang totalnya pagu anggaran sebesar Rp. 7.242.872.393,00 dan terakhir PAK dengan anggaran sebesar Rp. 7.224.490.078,00

Berikut tabel Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

Tabel 1.1

Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2	3
APBD	2022	7,703,123,705
DAK NON FISIK	2022	355,472,060
APBD	2023	7,224,490,078
DAK NON FISIK	2023	365,200,000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

1.2.3 Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat di Kota Pasuruan;
2. Meningkatkan upaya penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Pasuruan, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk- produk khas Kota Pasuruan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan UU No. 19/2019 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 20 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Meningkatkan Pertumbuhan Investasi.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka perlu dirumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

Adapaun kebijakan-kebijakan yang dilakukan, sedangkan tujuan dan sasaran memiliki masing-masing indikator, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	245.356.920.000	256.732.036.083	264.306.470.502	283.772.582.818	292.853.305.468
		Meningkatnya pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal	83.56	85.2	86.4	92.55	93.00
		Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%
			Nilai SAKIP PD	72	72	72.55	75	80
			Persentase temuan yang ditindak lanjuti	90%	90%	90%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama terdapat 1 tujuan yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%). Definisi Operasionalnya, Peningkatan jumlah Nilai Investasi, dan rumus $\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 terdapat 2 Sasaran. Yang pertama, Meningkatnya Nilai Investasi dengan Indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi (Miliar Rupiah). Definisi Operasional Jumlah Nilai Investasi yang di peroleh dari Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan rumus $\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun 2022}} \times 100\%$. Sasaran yang kedua, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Indeks). Definisi Operasionalnya Nilai IKM di peroleh dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan rumus $\frac{\text{Nilai IKM Tahun 2023}}{\text{Nilai IKM Tahun 2022}} \times 100\%$.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persen	Peningkatan jumlah Nilai Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)-Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)/Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)*100%	Bidang Penanaman Modal
2	Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	Miliar Rupiah	Jumlah Nilai Investasi yang di peroleh dari Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)	Bidang Penanaman Modal
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks	Nilai IKM di peroleh dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengaduan
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	Persen	Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan terhadap sasaran SKPD	Jumlah Realisasi Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD / Program Dukungan Sasaran SKPD X 100%	Sekretariat
		Nilai SAKIP PD	Nilai	Penilaian Atas Fakta Objektif Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Sekretariat

		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	Persen	Persentase temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yg ditindaklanjuti dibandingkan dg total temuan APEP dan APIP tahun berjalan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan yg ditindaklanjuti + jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjln yg di TL)x100%/ (jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan+jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan	Sekretariat
--	--	-----------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Memasuki Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan merupakan manifestasi komitmen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2015-2021).

RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota (PERWALI) No. 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascading RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026.

Visi Walikota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Maju Ekonominya

- a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja

melayani dengan pasti (professional, amanah, senyum, tanpa imbalan)

- b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata berupa Wisata Religi, Budaya, Adat Istiadat, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal
 - c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi
 - d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih
2. Indah Kotanya
- a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar
 - b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel
3. Harmonis Warganya
- a. Memperkuat Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis
 - b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta perlindungan dari covid-19
 - c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

Misi Walikota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
- 2. MISI 2** Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
- 3. MISI 3** Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- 4. MISI 4** Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan ditetapkan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah.

Adapun Tabel Rencana Kinerja tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dapat di lihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah			Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	2.4
		1.1	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	Miliar Rupiah	264,306,470,502
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks	86.4
		1.3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	Persen	90%
				Nilai SAKIP	Nilai	72.55
				Persentase temuan yang ditindak lanjuti	Persen	90%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian kinerja Kota Pasuruan 2023 mengacu pada dokumen Reviu RPJMD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023, serta dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Kota Pasuruan telah menetapkan Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1.67%

2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	255,269,339,600
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	86.4
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	90%
		Nilai SAKIP	72.55
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	90%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.145.302.141,00
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 156.275.440,00
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 2.391.934.528,00
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 451.294.000,00
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 118.441.060,00

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 yang mendukung Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 4 Program, 4 Kegiatan dan, 8 Sub Kegiatan yang memiliki Sasaran, Indikator Kinerja serta Target seperti yang terinci pada table di bawah ini:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Sasaran Program : Meningkatkan minat investor	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	10%
2	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10%

3	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
4	Sasaran Program : Meningkatnya pelaku usaha yang tertip penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	70%
5	Sasaran Kegiatan : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	30 Pelaku Usaha
6	Sasaran Sub Kegiatan : Terkoordinasikan dan tersinkronisasikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	256 Pelaku Usaha
7	Sasaran Sub Kegiatan : Terkoordinasikan dan Tersinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	60 Pelaku Usaha
8	Sasaran Program : Meningkatnya Masyarakat yang Puas	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perizinan	80%
9	Sasaran Kegiatan : Terlayannya Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	1500 Izin
10	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300 Pelaku Usaha
11	Sasaran Sub Kegiatan : Terpantaunya Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha
12	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang

13	Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah	10 Kegiatan Usaha
5	Sasaran Program : Meningkatnya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	15%
6	Sasaran Kegiatan : Terkelolahnya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tertintegrasikan	Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasikan	500 Data
14	Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolahnya, Tersajinya dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 156.275.440,00
2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 451.294.000,00
3. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Rp 2.391.934528,00
4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 118.441.060,00

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1.67%	2.40%
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	255,269,339,600	264,306,470,502
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	86.4	86.4
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	90%	90%
		Nilai SAKIP	72.55	72.55
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	90%	90%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Program	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.145.302.141,00	Rp 4.507.481.826,00
2.Program Promosi Penanaman Modal	Rp 156.275.440,00	Rp 86.725.440,00
3.Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 2.391.934.528,00	Rp. 1.997.499.432,00
4.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 451.294.000,00	Rp. 489.742.320,00
5.Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 118.441.060,00	Rp. 143.041.060,00

**Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
Tahun 2023**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
2	Sasaran Program : Meningkatnya minat investor	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	10%
3	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	10%
4	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	0 Dokumen
5	Sasaran Program : Meningkatnya pelaku usaha yang tertib penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	70%

6	Sasaran Kegiatan : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	30 Pelaku Usaha
7	Sasaran Sub Kegiatan : Terkoordinasikan dan tersinkronisasikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	256 Pelaku Usaha
8	Sasaran Sub Kegiatan : Terkoordinasikan dan Tersinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	60 Pelaku Usaha
9	Sasaran Program : Meningkatnya Masyarakat yang Puas	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perizinan	80%
10	Sasaran Kegiatan : Terlayannya Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	1500 Izin
11	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300 Pelaku Usaha
12	Sasaran Sub Kegiatan : Terpantaunya Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha
13	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang

14	Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah	10 Kegiatan Usaha
15	Sasaran Program : Meningkatnya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	15%
16	Sasaran Kegiatan : Terkelolahnya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tertintegrasikan	Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasikan	500 Data
17	Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolahnya, Tersajinya dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1.Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 156.275.440,00	Rp 86.725.440,00
2.Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.391.934.528,00	Rp 489.742.320,00
3.Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Rp. 451.294.000,00	Rp 1.997.499.432,00

4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi

Rp 143.041.060,00

Perizinan dan Non Perizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah

Rp. 118.441.060,00

Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2.4	6.95	289.58	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	264,306,470,502	276,043,368,500	104.44	Sangat Tinggi	DPMPTSP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	86.4	90.91	105.22	Sangat Tinggi	DPMPTSP
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	90%	100%	111.11	Sangat Tinggi	DPMPTSP
5		Nilai SAKIP	72.55	71.21	98.15	Sangat Tinggi	DPMPTSP
6		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	90%	100%	111.11	Sangat Tinggi	DPMPTSP

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja dengan Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah sebesar 289.58 persen (dalam kategori AA, sangat memuaskan). Angka 289.58 persen didapatkan dari rumus Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah tahun 2023 senilai 6.95 persen di bagi dengan Target Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah tahun 2023 senilai 2.4 persen dikalikan 100 persen.

Pada sasaran pertama, Meningkatnya Nilai investasi sebesar 104,44 persen (dalam kategori AA, sangat memuaskan). Angka 104,44 persen didapatkan dari rumus Realisasi Jumlah Nilai Investasi tahun 2023 senilai Rp. 276,043,368,500 dibagi Target Jumlah Nilai Investasi tahun 2023 senilai Rp. 264,306,470,502 dikalikan 100 persen. Pencapaian ini dikarenakan upaya dalam pelayanan perizinan dengan baik, sehingga banyak UMKM atau pelaku usaha yang mulai membuka usaha nya. Pada tahun 2023 banyak sekali pelaku usaha baru yang mengurus NIB pada Aplikasi OSS, sehingga pelaporan Investasi UMKM juga meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan mereka. Selain itu di dukung oleh Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan Pameran promosi pada ajang APEKSI dan MTQ ke XXX, selain itu melakukan Direct Promotion pada beberapa Konsulat Luar Negeri, Penjajakan kerjasama antar daerah bidang Penanaman Modal, Evaluasi dan pelaporan perkembangan investasi dan Pembinaan dan pengawasan izin dan non Perizinan bidang penanaman modal. Hal ini didukung oleh ketersediaannya anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 Rencana Aksi yang akan kami lakukan agar Nilai Realisasi Investasi meningkat, maka perlu upaya2 sebagai berikut:

1. Pembuatan dokumen IPRO (Investment Project Ready To Offer) untuk menarik Investor yang masuk ke Kota Pasuruan
2. Penyusunan Draft Perwali tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pendampingan Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pelaku Usaha untuk Pelaporan LKPM
4. Melengkapi sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik untuk mempermudah pengurusan Izin Berusaha.
5. Adanya Inovasi "SIAP BOSS" (Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS) untuk

mempermudah Pelaku Usaha mendapatkan NIB.

Pada sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal juga menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, yaitu 105.22. Angka 105.22 persen di dapat dari realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal senilai 90.91 dibagi dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal senilai 86.64 dikalikan 100 persen. Survei Kepuasan Masyarakat selalu dilakukan tiap tahunnya sebagai pengukuran mutu pelayanan perizinan. Pencapaian ini dikarenakan upaya DPMPTSP untuk memberikan layanan yang terbaik. Dengan berdirinya Mall Pelayanan Publik pada Bulan April tahun 2022 maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan pelayanan yang lain. Capaian ini juga di dukung adanya program Pelayanan perizinan, Peningkatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan penanaman modal, serta Program Penanganan pengaduan dan peningkatan mutu pelayanan perizinan.

Pada Tahun 2023 Rencana Aksi yang akan kami lakukan agar Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) meningkat, maka perlu upaya2 sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik di Kota Pasuruan untuk lebih mempermudah segala bentuk pelayanan di Kota Pasuruan.
2. Memberikan Fasilitas yang Layak dan Nyaman untuk para Pengguna Layanan.
3. Segera Menindak Lanjuti dan Mengevaluasi segala bentuk pengaduan baik melalui online maupun offline.
4. Memberikan kompensasi terhadap keterlambatan pelayanan perizinan.
5. Mempercepat waktu dalam melayani sesuai Standart Pelayanan
6. Melakukan Pembayaran melalui Q-Ris
7. Adanya Inovasi Si Cantik untuk Tanda tangan Elektronik sehingga Pemohon tidak perlu menunggu Kepala DPMPTSP untuk Tanda Tangan
8. Adanya Inovasi CIAMIK Untuk Cetak Izin Mandiri lewat Si Cantik, sehingga Pemohon tidak perlu datang ke Mall Pelayanan Publik.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	(47.36)	2.86	2.03	2.4	6.95	289.58
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	245,952,766,000	252,987,816,400	258,111,787,642	264,306,470,502	276,043,368,500	104.44
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	83.13	84.34	87.135	86.4	91	105.22
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	100%	100%	100%	90%	100%	111.11
		Nilai SAKIP	51.99	66.61	71.21	72.55	71.21	98.15
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	90%	100%	111.11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2023

Pada Tahun 2020 Adanya wabah COVID-19 sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Turunnya daya beli masyarakat dan pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara. Hal itu sangat mempengaruhi penurunan realisasi investasi di Kota Pasuruan, sehingga Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah hasilnya minus atau senilai -47.36%. Namun pada Tahun 2021 kondisi sudah mulai Endemi, beberapa usaha dan pertokoan sudah mulai buka dan berkembang, daya beli masyarakat juga sudah mulai meningkat, sehingga mulai ada peningkatan realisasi investasi senilai 2.86%.

DPMPTSP Kota Pasuruan memiliki target pertumbuhan investasi. Penetapan target ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan investasi dari tahun ke tahun dan dapat diperkirakan dapat terealisasi. Nilai investasi di tahun 2022 mencapai Rp. Rp. 258.111.787.642,-. sedangkan di tahun 2023 nilai investasi mencapai Rp. 276.043.368.500,-. terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 6.95 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023. Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagai Pemerintah daerah dengan Kinerja Pertumbuhan Realisasi Investasi Terbaik di Jawa Timur tahun 2023.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, pelayanan Perizinan juga menjadi indikator sasaran DPMPTSP, yakni Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal, dioperasionalkan dalam tujuan pembangunan untuk memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP tahun 2022 dengan indeks 87,14, tahun 2023 dengan indeks 90.91 yang berarti sangat baik dan memenuhi target yang ditentukan yaitu 86.4, sehingga mencapai 105,22 persen.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasruuan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6.95	2.4	289.58
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	276,043,368,500	264,306,470,502	104.44
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	91	86.4	105.22
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	100%	90%	111.11
		Nilai SAKIP	71.21	80	Belum Ada
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	90%	111.11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2023

Tabel diatas menunjukkan kemajuan capaian sasaran strategis dengan Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah, indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah dengan target 2.4 persen dan realisasi 6.95 persen dengan tingkat kemajuan sebesar 289.58 persen. Dalam perspektif Perencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026, penyelenggaraan urusan penanaman modal untuk mencapai sasaran strategis didukung program/kegiatan beserta indikatornya. Jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 2021-2026, indikator dan capaian akhir tahun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2026, capaian kinerja tahun 2023 pada indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah melebihi target tahun 2025 dengan capaian 338.89 persen. Indikator pertumbuhan investasi melebihi target tahun 2025 dengan capaian 103.94 persen, begitu juga dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal melebihi target dengan capaian 102.37 persen.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/Pripinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6.95	10.2	68.14%
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	276,043,368,500	145,103,835,560,004	0.19%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	90.91	89.15	101.97%
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
		Nilai SAKIP	71.21	81.06	87.85%
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100.00%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2023

Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur apabila dibandingkan dengan Kota Pasuruan pada Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah senilai 52.26 persen, pada indikator Jumlah Nilai Investasi senilai 0.22 persen hal ini dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Timur mengepul realisasi investasi daerah kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur termasuk Kota Pasuruan. Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal senilai 101.97% lebih besar Kota Pasuruan dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur. Pencapaian ini dikarenakan upaya DPMPTSP untuk memberikan layanan yang terbaik. Dengan berdirinya Mall Pelayanan Publik pada Bulan April tahun 2022 maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan pelayanan yang lain. Capaian ini juga di dukung adanya program Pelayanan perizinan, Peningkatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan penanaman modal, serta Program Penanganan pengaduan dan peningkatan mutu pelayanan perizinan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2.4	6.95	289.58%	Adanya pendampingan para pelaku usaha sebagai upaya sosialisasi OSS	
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	264,306,470,502	276,043,368,500	104.44%	Adanya sosialisasi dan pendampingan dengan para calon investor/pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	86.4	90.91	105.22%	Adanya penambahan sarana prasarana yang tersedia sebagai upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.	
4	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	90%	100%	111.11%	Adanya Anggaran yang mendukung ketercapaian Program	

		Nilai SAKIP	72.55	71.21	98.15%	Adanya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi yang tepat dan selaras	
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	90%	100%	111.11%	Adanya tindak lanjut temuan BPK yang cepat	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Untuk tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah dengan Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah serta Sasara pertama Meningkatkan Nilai Investasi dengan indikator Jumlah Nilai Investasi penyebab keberhasilannya hampir sama yaitu:

- a. Adanya pendampingan para pelaku usaha sebagai upaya sosialisasi OSS dan pelaporan LKPM;
- b. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
- c. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;

Untuk Sasaran kedua Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal penyebab keberhasilannya yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2023 dengan penyerapan anggaran mencapai 85.98% dengan predikat Kinerja Tinggi;
- b. Adanya Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Pemerintah Kota Pasuruan;
- c. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Pasuruan.
- d. Adanya penambahan sarana prasarana yang tersedia sebagai upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. Optimalisasi penggunaan aplikasi Si Cantik untuk kemudahan dalam mengurus perizinan dan non perizinan; dan
- f. Adanya penambahan sarana prasarana yang tersedia sebagai upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/Lembaga/stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di MPP;
- b. Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD teknis terkait perizinan dan non

- perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, pendampingan, dan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
 - d. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan para calon investor/pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM;
 - e. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikuti diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 - f. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; dan
 - g. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja			Anggaran			Hasil Perkalian Capaian Kinerja dengan Pagu	Hasil Pengurangan dengan Serapan	EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (Persen)	2.40%	6.95%	289.58%	576,467,760	404,457,760	70.16%	1,669,354,555	1,264,896,795	312.74%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi (Miliar)	264,306	276,043	104.44%	576,467,760	404,457,760	70.16%	602,066,884	197,609,124	48.86%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Indeks)	86.4	90.91	105.22%	2,140,540,492	1,737,087,318	81.15%	2,252,274,724	515,187,406	29.66%

Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	90%	100%	111.11%	4,507,481,826	4,069,731,139	90.29%	5,008,313,140	938,582,001	23.06%
	Nilai SAKIP	72.55	71.21	98.15%	23,370,040	21,778,280	93.19%	22,938,395	1,160,115	5.33%
	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	90%	100%	111.11%	4,507,481,828	4,069,731,139	90.29%	5,008,313,142	938,582,003	23.06%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2023

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Beberapa kegiatan surat menyurat dilaksanakan melalui *e-office (paperless)*; dan
- e. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin dan yang benar-benar perlu pemeliharaan/penggantian suku cadang.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	104.44	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	10	72.73	727%	Menunjang	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	70	124	177%	Menunjang	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	105.22	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan	80	97	120.7%	Menunjang	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan	15	15.00	100.00%	Menunjang	
3	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian Program dukungan Sarana Perangkat Daerah	111.11%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	100	111.11%	Menunjang	

		Nilai SAKIP	71.21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	100	111.11%	Menunjang	
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti	111.11%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	100	111.11%	Menunjang	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2023

NB:

1. Capaian 727% Diperoleh dari Target Indikator **Program Promosi Penanaman Modal** sebanyak 10% yang dicapai sebanyak 727% sehingga Capaian dibagi Target ($72.73\% / 10\% = 727\%$)
2. Capaian 60% Diperoleh dari Target Indikator **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** sebanyak 70% yang dicapai sebanyak 42% sehingga Capaian dibagi Target ($42\% / 70\% = 60\%$)
3. Capaian 120.7% Diperoleh dari Target Indikator **Program Pelayanan Penanaman Modal** sebanyak 80% yang dicapai sebanyak 97% sehingga Capaian dibagi Target ($97\% / 80\% = 120.7\%$)
4. Capaian 100% Diperoleh dari Target Indikator **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** sebanyak 15% yang dicapai sebanyak 15% sehingga Capaian dibagi Target ($15\% / 15\% = 100\%$)

Dari ke 4 (Empat) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 jika dilihat dari capaian kinerja, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal rata-rata capaian fisiknya paling rendah yaitu sekitar 60%, hal ini diakibatkan karena adanya perubahan anggaran pada pergeseran di awal tahun, sehingga realisasi kinerja menjadi terhambat.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Promosi Penanaman Modal	86,725,440	85,173,800	98.21
2	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	86,725,440	85,173,800	98.21
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	489,742,320	319,283,960	65.19
4	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	489,742,320	319,283,960	65.19
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	1,997,499,432	1,625,945,718	81.40
6	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1,997,499,432	1,625,945,718	81.40
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	143,041,060	111,141,600	77.70
8	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143,041,060	111,141,600	77.70
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,507,481,826	4,069,731,139	90.29
10	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,370,040	21,778,280	93.19

11	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,738,202,956	3,341,852,634	89.40
12	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,946,940	10,561,800	96.48
13	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,698,280	22,637,840	99.73
14	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154,359,640	151,970,433	98.45
15	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,799,200	25,700,000	99.62
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247,697,670	215,845,837	87.14
17	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,407,100	279,384,315	98.23

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2023

Program Promosi Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 86,725,440 terealisasi Rp. 85,173,800 atau 98.21%. Anggaran tersebut digunakan untuk pameran APEKSI dan MTQ ke XXX. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran Rp. 489,742,320 terealisasi Rp. 319,283,960 atau 65.19%. Rendahnya serapan anggaran pada program ini di sebabkan karena Penyerapan anggaran DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal sangat minim karena ada beberapa juknis DAK yang tidak bisa diserap dikarenakan tidak sesuai dengan SHS Kota Pasuruan. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 1,997,499,432 terealisasi Rp. 1,625,945,718 atau 81.40%. Anggaran pada Program ini salah satunya di peruntukkan untuk Belanja Operasional Mall Pelayanan Publik selama tahun 2023 dan Rehab Belanja Gedung dan Bangunan pada lantai 2 Mall Pelayanan Publik. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 143,041,060 terealisasi senilai Rp. 111,141,600 atau 77.70%. Program ini salah satunya yaitu pemeliharaan Aplikasi.

Perencanaan kinerja tidak hanya merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan), dan apa hasilnya (output, outcome), akan tetapi sekaligus menetapkan target hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu perencanaan kinerja yang baik akan sangat bergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun – tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi ataupun prognosis / proyeksi ke depan.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan

urusan wajib pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dimana pelaksanaannya didukung oleh 4 (Empat) program dan 4 (Empat) kegiatan dengan dengan anggaran APBD sebesar Rp. 7.224.490.078 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 6.211.276.217 (Enam Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau tingkat serapannya mencapai 85,98%.

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 80.63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90.29%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Program Promosi Penanaman Modal (98,21%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (65.19%). Penyerapan anggaran DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal sangat minim karena ada beberapa juknis DAK yang tidak bisa diserap dikarenakan tidak sesuai dengan SHS Kota Pasuruan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

BAB IV

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Kota Pasuruan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, diharapkan dapat menjadi aplikator lembaga daerah yang mengaplikasikan system pelayanan terpadu satu pintu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal. Sistem pelayanan satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, namun dalam perjalanan pelaksanaannya masih saja terjadi beberapa permasalahan yang timbul, hal ini dikarenakan adanya faktor intern dan ekstern. Permasalahan yang terjadi tentu akan diupayakan solusinya guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan solusi yang diupayakan adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahannya adalah :

1. Kurangnya kesadaran pengusaha atas kewajiban pelaporan perkembangan penanaman modal dari kegiatan usahanya;
2. Regulasi teknis Perizinan yang masih bersifat sektoral;
3. Sinergisitas antar OPD teknis yang belum optimal;
4. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur Perizinan, khususnya Perizinan usaha elektronik terintegrasi / Online single submission (OSS);
5. Kurangnya fasilitas Mall Pelayanan Publik yang mendukung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, berikut ini direkomendasikan solusi untuk perbaikan layanan urusan penanaman modal di tahun-tahun yang akan datang, yakni:

1. Pelaksanaan kegiatan harus tepat sasaran;
2. Segera dilakukan Reviu regulasi (peraturan daerah) terkait pelayanan Perizinan;
3. Mengoptimalkan sinergisitas antar OPD terkait dalam rangka penguatan iklim investasi;
4. Bentuk sosialisasi bisa dengan melakukan pendampingan kepada pemohon saat pengajuan izin dan pengisian aplikasi OSS;
5. Pelayanan perizinan dengan memperhatikan protocol Kesehatan.
6. Penyusunan project prospectus dan profil potensi investasi yang up to date.
7. Penambahan Fasilitas Mall Pelayanan Publik.